

**SINKRONISASI PERATURAN KPU DENGAN UNDANG-UNDANG
PEMERINTAHAN ACEH PADA PENYELENGGARAAN PILKADA
SERENTAK DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017**

TESIS

OLEH :

**FAKHRUDDIN
NIM. 1720862032**

Pembimbing I : Dr.Yuslim, SH.MH
Pembimbing II : Dr.Syamsurizaldi, S.IP.SE.MM



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

ABSTRAK

Nama : **Fakhruddin**

Program Studi : Megsiter Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu

Judul : Sinkronisasi Peraturan KPU Dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 memiliki peraturan khusus dan nasional, penetapan suatu keputusan ditetapkan pada waktu yang berlaku secara nasional sementara pada aturan khusus memiliki tambahan tahapan tersendiri sehingga membutuhkan waktu yang lebih, detail dan teliti karena penyelenggara terlebih dahulu mensinkronkan keputusannya antara peraturan KPU turunan Undang-undang Pilkada dengan Qanun Aceh yang mengatur tentang Pilkada turunan dari Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinkronisasikan peraturan khusus dan nasional dan menemukan perbedaannya serta mengungkapkan implikasi kedua aturan tersebut. Teori yang digunakan pertama Teori Hans Kelsen yang dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky yang disebut “ *Die Theori Vom Stufenordnung der rechnormen* ” yakni suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, serta norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada hukum yang lebih tinggi lagi sampai pada titik jenuh dimana norma tidak dapat ditelusuri lebih lanjut kedua teori *Good Governance* (pemerintahan yang baik), tiga Teori Desentralisasi Asimetris. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Jenis Hukum Normatif. Variabel yang diteliti yaitu Sinkronisasi Peraturan yang berlaku secara nasional dan yang khusus. Hasil Penelitian, Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tamiang terlebih dahulu melakukan diskusi (pembahasan internal), masukan-masukan dari pemangku kepentingan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu, koordinasi dengan pemerintahan daerah, serta konsultasi baik dengan KIP Provinsi Aceh maupun KPU Republik Indonesia, hasil diskusi dan koordinasi maka KIP kabupaten Aceh Tamiang menetapkan keputusan KIP Aceh Tamiang yang mengakomodir peraturan khusus dan nasional sebagai bentuk penyeragaman dan penyerasian yang diatur dalam tahapan, program dan jadwal sesuai dengan Undang-undang pemerintahan Aceh dan berpedoman pada peraturan KPU. Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2017 memiliki perbedaan dengan Pilkada serentak yang berlangsung di Provinsi dan Kabupaten serta Kota lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasinya tambahan anggaran APBD, memperkuat syari’at Islam, pilkada aman dan damai, memperkuat partai politik lokal, memperkuat kearifan lokal. Saran penulis, pilkada Aceh kedepan kiranya pemerintah pusat membuat undang-undang khusus pemilihan kepala daerah wilayah Aceh sebelum pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung dengan kalaborasi peraturan yang berlaku nasional dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dikarenakan penelitian ini keterbatasan waktu, kelemahan penelitian ini kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pilkada di kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh.

Kata kunci : Sinkronisasi, peraturan, penyelenggara, pilkada

ABSTRACT

Name : Fakhruddin
Program Study : Megister Of Political Science Concentration In Electoral Governance
Title : Synchronizing The KPU Regulation With Law Of The Aceh Government At The Operation Of The Pilkada In Theaceh Tamiang District, 2017

The implementation of the elections in Aceh Tamiang district in 2017 has special and national regulations, the stipulation of a decision set at the time that applies nationally while the special rules have additional stages so that it requires more, detailed and thorough time because the organizers synchronize their decisions between KPU regulations derivative of the Election Law with the Aceh Qanun which regulates regional elections derived from the Aceh Government Law Number 11 of 2006. The research aims to describe the synchronization of special and national regulations and find differences and express the implications of the two rules. The first theory used by Hans Kelsen's theory developed by his student, Hans Nawiasky, called " Die Theori Vom Stufenordnung der rechnormen ", which is a lower legal norm applies, sourced and based on higher norms, and higher legal norms. valid, sourced and based on higher law to the point of saturation where norms cannot be traced further both Good Governance theory, three Asymmetric Decentralization Theories. This study uses Qualitative Research Methods with the Normative Legal Type Approach. The variables studied are Synchronization Regulations that apply nationally and specifically. Research Results, Synchronization of Regulations of the General Election Commission with the Law on Aceh Government, KIP of Aceh Tamiang Regency first held discussions (internal discussions), input from stakeholders by paying attention to the principles of election management, coordination with regional government, and good consultation with the Aceh provincial KIP and the KPU of the Republic of Indonesia, as a result of discussion and coordination, the Aceh Tamiang Regency KIP determined the decision of the Aceh Tamiang KIP to accommodate special and national regulations as a form of harmonization arranged in stages, programs and schedules in accordance with the Aceh government law and based on KPU regulations. The elections of the Regent and Deputy Regent of Aceh Tamiang in 2017 differ from the simultaneous regional elections that take place in other Provinces and Regencies / Cities in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The implication is the additional APBD budget, strengthening Islamic shari'a, safe and peaceful regional elections, strengthening local political parties, strengthening local wisdom. The author's suggestion, the upcoming Aceh regional election would have made the central government make a special law on regional head elections in Aceh before the regional election stage took place with the calorization of nationally applicable regulations with the Aceh Governance Law, because of this time-limited research, research weaknesses further related to the elections in the Aceh Tamiang district of Aceh province.

Keywords: Synchronization, regulation, implementation, regional election

